



MEMETAKAN LAGUNA: PRODUKSI KOLONIAL ATAS SEGARA ANAKAN DAN KAMPUNG LAUT (1690–1950)

Faith Liberta Aieda Muhammad

Magister Antropology, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjahmada Indonesia

Abstrak

Artikel ini menelusuri bagaimana Laguna Segara Anakan di pesisir selatan Jawa diproduksi sebagai ruang kolonial melalui praktik pengetahuan dan kekuasaan sejak akhir abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Dengan menggunakan sumber arsip kartografi VOC, laporan hidrografi kolonial, serta catatan sejarah lisan mengenai asal-usul Kampung Laut, penelitian ini menunjukkan bahwa laguna bukan sekadar bentang alam ekologis, melainkan hasil konstruksi politik dan ekonomi yang dibentuk oleh eksplorasi, pemetaan, dan kontrol administratif. Pemetaan awal oleh Pieter de Gilde (1692) dan Cornelis Coops (1698) menjadikan Segara Anakan bagian dari jaringan navigasi dan perdagangan selatan Jawa. Aktivitas eksploitasi mutiara pada awal abad ke-18, kebijakan forest enclosure di Priangan pada abad ke-19, dan militerisasi Nusakambangan pada awal abad ke-20 secara bertahap mengubah laguna menjadi frontier strategis kolonial yang menghubungkan kepentingan ekologi, ekonomi, dan keamanan. Artikel ini berkontribusi pada kajian kolonial Indonesia dengan menunjukkan bahwa asal-usul Kampung Laut berakar pada proses panjang kolonialisasi ruang perairan yang warisannya masih membayang dalam cara negara modern memahami dan mengelola Segara Anakan hingga hari ini.

Kata Kunci: Segara Anakan, kartografi, kolonialisme, Nusakambangan, Kampung Laut.

PENDAHULUAN

Segara Anakan di pesisir selatan Jawa merupakan salah satu kawasan laguna tropis paling dinamis di Indonesia. Dalam wacana geografis kontemporer, ia dikenal sebagai wilayah yang terus mengalami penyempitan

akibat sedimentasi dan perubahan tata guna lahan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy. Namun jauh sebelum menjadi objek penelitian ekologi modern, Segara Anakan telah lebih dahulu hadir dalam imajinasi dan praktik kolonial sejak akhir abad ke-17 sebagai

*Correspondence Address : faithlibertaiedamuhammad@mail.ugm.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v13i1.2026. 121-130

© 2026UM-Tapsel Press

ruang yang harus dipetakan, dieksploitasi, dan dikendalikan. Dalam konteks ini, pengetahuan geografis kolonial tidak hanya mencatat alam, tetapi secara aktif memproduksi sebagai objek kekuasaan.

Arsip kartografi VOC menunjukkan bagaimana pesisir selatan Jawa mulai diproduksi sebagai ruang kolonial melalui pemetaan. Peta Pieter de Gilde dan Hendrick Janse Ross (1692) yang menamai Segara Anakan sebagai Danau Preanger menandai awal integrasi kawasan dalam jaringan navigasi dan perdagangan kolonial (Schilder, 1981). Proses ini berlanjut pada abad ke-18 melalui eksploitasi Mutiara dan perkebunan serta pemetaan desa-desa pesisir seperti Oedjong Allang dan Lepen Bondan (Hardoyo, 1982; Schwerdtner Máñez, 2010), memperlihatkan bagaimana kolonialisme menamai sekaligus menguasai ruang. Pada abad ke-19, perhatian kolonial beralih ke hulu melalui ekspansi perkebunan kopi Priangan dan kebijakan *forest enclosure* yang menjadikan hutan sebagai “hutan negara” atas nama konservasi (De Haan, 1931; Galudra & Sirait, 2009; Lukas, 2017a), menyingkirkan masyarakat lokal dan mengubah relasi manusia–alam.

Sejumlah kajian telah menyinggung Segara Anakan dari berbagai sudut. seperti Schilder (1981), Schwerdtner Máñez (2010) membahas eksploitasi Mutiara dan sumberdaya perairan, Lukas (2017) mengaitkan sedimentasi dengan sejarah kolonial Priangan, Zahro (2013) menelusuri migrasi Kampung Laut, Sedangkan Sanjatismiko (2018) merekam asal-usul komunitas pesisir laguna. Stutje dkk. (2019) secara penting menempatkan Nusakambangan dalam konteks kolonialisme akhir Hindia Belanda sebagai koloni hukuman yang menggabungkan disiplin sosial, produksi agraris, dan pengawasan ekologis.

Namun demikian, kajian-kajian tersebut masih cenderung terpisah dan

belum secara eksplisit menghubungkan pemetaan, konservasi, dan pemindahan penduduk sebagai satu rangkaian produksi pengetahuan kolonial atas Segara Anakan.

Untuk mengisi celah tersebut, penelitian ini memadukan pendekatan sejarah lingkungan McNeill (2003) dan analisis topografi kritis atas kartografi kolonial (Craib, 2009; Crampton, 2011). secara teoretis, analisis ini berpijak pada konsep *production of space* (Lefebvre, 1991) dan *political forest* (Peluso, 1992), untuk membaca bagaimana ruang kolonial diproduksi melalui representasi, eksploitasi ekonomi, dan penguasaan ekologis.

Artikel ini bertujuan menelusuri produksi kolonial atas Segara Anakan melalui tiga fase utama: pemetaan dan eksploitasi pada masa VOC, pengendalian lingkungan melalui *forest enclosure* abad ke-19, serta militerisasi Nusakambangan yang mendorong terbentuknya komunitas Kampung Laut. Dengan demikian, Segara Anakan dibaca bukan semata sebagai laguna ekologis, melainkan sebagai ruang historis tempat pengetahuan, kekuasaan, dan ekologi saling berkelindan.

METODE PENELITIAN

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan tahapan dalam penelitian sejarah—heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi—yang diadaptasi dalam kerangka sejarah lingkungan. Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber primer berupa arsip kartografi VOC, laporan hidrografi abad ke-18 dan ke-19, serta dokumen kebijakan kehutanan Hindia Belanda. Arsip-arsip ini, seperti *Kaart van de Zuidkust van Java* (Paulusz, 1739) dan laporan *waterstaat* kolonial, dibaca sebagai teks kekuasaan, bukan sekadar data geospasial. Tahap verifikasi dilakukan dengan menilai keaslian dan posisi sumber dalam konteks wacana kolonial; interpretasi dilakukan melalui

analisis relasi antara pemetaan, konservasi, dan mobilitas penduduk; sedangkan tahap historiografi digunakan untuk menulis ulang sejarah Segara Anakan sebagai hasil dari *kolonialisasi ruang*.

Selain arsip tertulis, penelitian ini juga menggunakan sumber sejarah lisan dari Kampung Laut (Ujungalang, Panikel, dan Ujung Gagak) sebagaimana dicatat dalam Sanjatmiko (2016) dan Ulya & Sanjatmiko (2017). Kesaksian lokal ini penting untuk memahami pengalaman masyarakat yang menjadi subjek dari kebijakan kolonial. Dengan memadukan arsip dan narasi lisan, penelitian ini menempatkan Segara Anakan sebagai ruang yang bukan hanya diukur dan diatur oleh kolonial, tetapi juga direspon dan dinegosiasikan oleh masyarakat pesisir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

GEOMORFOLOGI DAN PEMETAAN AWAL (1690–1700)

Memahami sejarah kolonial Segara Anakan perlu diawali dari sejarah geomorfologinya. Laguna ini terbentuk sekitar lima ribu tahun lalu ketika spit pasir dari barat Cilacap bergerak ke arah timur laut dan menutup teluk besar di muara Sungai Citanduy, membentuk kolam air payau yang kemudian berkembang menjadi sistem mangrove dan rawa-rawa luas (Bird, 1982; Setyawan, 2002; Sujanto & Sumantri, 1977). Sedimentasi dari sungai-sungai besar seperti Citanduy, Cimeneng, dan Cibeureum secara bertahap mengubah tepian laguna menjadi lahan basah produktif. Dalam perspektif sejarah lingkungan, dinamika geomorfologi ini tidak hanya membentuk lanskap fisik, tetapi juga menentukan cara manusia menafsirkan dan mengelola wilayah pesisir selatan Jawa (Hardoyo, 1982).

Keterlibatan kolonial dalam membayangkan Segara Anakan paling awal terekam dalam arsip kartografi

VOC. Peta Pieter de Gilde dan Hendrick Janse Ross tahun 1692 menamai kawasan ini sebagai *Danau Preanger* (Schilder, 1981), mencerminkan keterbatasan pemahaman hidrologi Eropa atas sistem pesisir Jawa. Meski keliru secara teknis, penamaan ini penting karena menandai awal proses kolonial dalam menamai, mengukur, dan mengklaim ruang. Dalam kerangka *critical cartography*, Harley (1989) dan kajian pasca-Harley tentang *critical cartography* (Craib, 2009; Crampton & Krygier, 2005), peta bukan sekadar alat representasi, melainkan teknologi kekuasaan yang memproduksi kenyataan geografis.

Pada 1698, pemetaan ulang oleh Cornelis Coops memperkenalkan istilah *Sagaranackan*, menandai pergeseran persepsi dari “danau pedalaman” menjadi “segara” dengan fungsi strategis (Schilder, 1981). Dalam arsip pelayaran, Coops melaporkan laguna mulai dipahami sebagai tempat berlindung kapal kecil dari ombak Samudra Hindia sekaligus pintu masuk menuju jaringan sungai di pedalaman Priangan. Sejak saat itu, Segara Anakan tidak hanya dipetakan, tetapi juga dikonseptualisasikan sebagai *frontier* antara laut terbuka dan sistem perdagangan darat Jawa bagian barat.

Menariknya, peta-peta awal VOC hampir tidak menyajikan informasi tentang sedimentasi, vegetasi mangrove, atau dinamika ekologis laguna (lihat De Jonge, 1911). Aspek-aspek ini dianggap tidak penting dalam logika kolonial karena tidak langsung terkait dengan navigasi atau komoditas. Selektivitas ini menunjukkan bahwa pengetahuan kolonial disusun berdasarkan kepentingan navigasi dan komoditas, bukan kompleksitas ekosistem. Seperti ditegaskan (Craib, 2009; Crampton, 2011), peta kolonial menyederhanakan realitas agar dapat ditundukkan secara administratif.

Dengan demikian, sejak pemetaan pertama pada 1692 hingga awal abad ke-18, Segara Anakan telah diproduksi sebagai “ruang bergambar” yang eksistensinya dalam arsip kolonial sama pentingnya dengan keberadaannya sebagai lanskap fisik. Pemetaan awal ini menjadi fondasi bagi kebijakan kolonial berikutnya—mulai dari eksploitasi sumber daya laut hingga pengendalian hutan dan mobilitas penduduk.

EKSPLOITASI MUTIARA DAN PEMETAAN DESA PESISIR (1700–1750)

Jika pada akhir abad ke-17 Segara Anakan diproduksi melalui pemetaan, maka pada paruh pertama abad ke-18 laguna ini mulai diproduksi melalui eksploitasi sumber daya dan integrasinya ke dalam jaringan komoditas kolonial. Arsip VOC mencatat bahwa pada 1709 dilakukan pengawasan atas pengumpulan sekitar delapan pon mutiara biji dari perairan Segara Anakan (Schwerdtner Máñez, 2010). Aktivitas ini melibatkan penduduk lokal di bawah kontrol pejabat Priangan, memperlihatkan bagaimana eksploitasi laut dikaitkan langsung dengan pengawasan administratif pedalaman. Dalam kerangka ini, Segara Anakan masuk ke dalam *regime of extraction* khas ekonomi kolonial VOC.

Eksploitasi mutiara menandai perluasan *frontier* kolonial ke wilayah pesisir. Manéz (2010) menyebut proses ini sebagai bagian dari “*blue frontier of colonialism*,” yakni ekspansi kolonial ke ruang laut yang sebelumnya belum terintegrasi dalam sirkulasi komoditas global. Namun, eksploitasi ini bersifat singkat dan destruktif. Dalam kurun kurang dari dua dekade, kualitas tiram menurun akibat sedimentasi dan rusaknya habitat dasar laguna, memperlihatkan paradoks kolonialisme ekologis: produksi nilai berjalan seiring dengan percepatan degradasi lingkungan.

Pada 1724, Francois Valentijn memetakan ulang Segara Anakan berdasarkan survei Cornelis Coops (1698) dengan memasukkan sembilan desa pesisir seperti Oedjong Allang, Oedjong Gajack, Lepen Bondan, dan Pakalongan (Schilder, 1981). Pencatatan toponimi lokal ini menunjukkan bahwa kolonial tidak hanya memetakan ruang, tetapi juga masyarakat. Dalam kerangka *critical cartography* (Craib, 2009), pemetaan desa merupakan proses simbolik yang menjadikan penduduk dapat diadministrasikan. Dengan memasukkan desa ke dalam peta, kolonial secara efektif mendaftarkan ruang hidup dan penghuninya ke dalam logika pemerintahan dan pengawasan.

Peta Valentijn menegaskan fungsi ganda Segara Anakan sebagai ruang navigasi sekaligus *frontier* ekonomi. Laguna menjadi penghubung antara hasil bumi Priangan dan jaringan pelayaran selatan Jawa, sekaligus sumber komoditas laut yang mengalir ke Batavia. Penyempurnaan peta oleh Paulus Paulusz pada 1739, dengan detail hidrografi dan kedalaman air yang lebih akurat, semakin mempertegas hubungan antara pengetahuan kartografis dan kemungkinan ekonomi serta militer di kawasan ini (Paulusz, 1739; Schilder, 1981).

Namun, hingga pertengahan abad ke-18, peta-peta kolonial hampir tidak mencatat dinamika sedimentasi, mangrove, atau perubahan ekologi laguna (Lukas, 2014). Fokus kolonial sepenuhnya pada aspek navigasi dan komoditas, bukan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, Segara Anakan diproduksi bukan sebagai ekosistem, melainkan sebagai lanskap ekonomi. Transformasi dari *mapping the lagoon* menjadi *mining the lagoon* menandai pergeseran penting dalam sejarah kolonial Segara Anakan: dari ruang yang dibingkai secara geografis menjadi ruang yang diaktifkan sebagai sumber nilai.

Pemetaan desa-desa pesisir pada periode ini juga merekam konfigurasi awal komunitas yang kelak menjadi cikal-bakal Kampung Laut. Dengan demikian, peta kolonial tidak hanya berfungsi sebagai arsip geografis, tetapi juga sebagai arsip sosial yang merekam relasi awal antara penduduk, laguna, dan kekuasaan kolonial.

FOREST ENCLOSURE DAN KONTROL HULU-HILIR (1850-1930)

Pada paruh kedua abad ke-19, perhatian kolonial terhadap Segara Anakan beralih dari laut ke daratan. Jika sebelumnya laguna dipahami sebagai ruang navigasi dan eksploitasi, sejak pertengahan abad ke-19 ia mulai dipersepsikan sebagai ruang yang mengalami krisis ekologis akibat kesalahan manusia di hulu. Kekhawatiran ini muncul bersamaan dengan meningkatnya erosi di wilayah Priangan dan Bagelen akibat ekspansi perkebunan kopi kolonial. Laporan *Waterstaat* (De Haan., 1931; Oosterling, 1927) mencatat bahwa sedimentasi dari pegunungan menyebabkan “penyempitan terus-menerus” di Segara Anakan dan mengganggu produktivitas perairan. Boomgaard (1999) menunjukkan bahwa sejak periode ini pemerintah kolonial mulai memandang degradasi hutan sebagai ancaman terhadap tata-air dan stabilitas ekonomi perkebunan. Melalui wacana konservasi, kerusakan lingkungan dibingkai sebagai kesalahan moral penduduk, bukan sebagai dampak langsung dari eksploitasi kolonial.

Konstruksi moral tersebut diperkuat oleh kebijakan agraria pasca-Perang Jawa melalui *Cultivation System* (1830-1870), yang memaksa desa-desa di Priangan dan Bagelen menanam kopi dan tebu di lereng-lereng curam. Breman (2015) menekankan bahwa mobilisasi tenaga kerja berlangsung secara koersif melalui kerja paksa dan kewajiban desa.

Di saat yang sama, penduduk juga diwajibkan menjalankan kerja *corvée* untuk pengawasan hutan dan produksi kayu (De Haan., 1931; Meindersma, 1923) (lihat juga Galudra & Sirait, 2009). Hutan ditetapkan sebagai aset negara yang harus dijaga demi mencegah erosi, tetapi penjagaan itu dijalankan melalui eksploitasi tenaga rakyat.



Peta 3. Peta topografi skala 1:625.000 dibuat H.W Meindersma menyoroti aliran sungai dan perubahan hidrologi serta adanya pendangkalan laguna. Diambil dari Meindersma (1923).

Melalui Undang-Undang Kehutanan Jawa dan Madura 1865 serta ordonansi berikutnya, negara kolonial membentuk *Dienst van het Boschwezen* dan mengklasifikasikan hutan sebagai “hutan negara” (Peluso, 1992). Kebijakan ini memicu proses *enclosure* yang menyingkirkan masyarakat dari akses atas hutan yang sebelumnya dikelola secara komunal. Peluso (1992) menyebut ini sebagai *political forest* yakni perubahan ruang ekologis menjadi instrumen kekuasaan administratif.

Pengawasan ekologis kemudian meluas ke pesisir. Catatan dan peta yang dibuat Meindersma (1923), kajian De Haan. (1931) dan juga Coster (1938) tentang *Tjilatjapsche Vloedbosschen* menunjukkan bagaimana mangrove Segara Anakan mulai diperlakukan

sebagai infrastruktur penting bagi pelabuhan kolonial. Degradasi mangrove akibat aktivitas rakyat dianggap sebagai penyebab utama pendangkalan laguna, sehingga kawasan rawa pesisir dimasukkan dalam sistem pengawasan kehutanan. Catatan Lukas (2017) menunjukkan Pada 1924, pemerintah kolonial membeli lahan di Bringkeng, Mentasan, untuk dijadikan hutan lindung DAS Citanduy yang memperluas logika *forest enclosure* hingga ke wilayah laguna.

Secara sosial, kebijakan ini menciptakan tekanan berlapis. Di hulu, petani kehilangan akses atas hutan dan tanah; di hilir, sedimentasi dijadikan alasan untuk memperketat intervensi negara. Tekanan ini memicu migrasi ekologis dari pegunungan ke wilayah rawa di sekitar Segara Anakan (Zahro, 2013), yang terekam dalam munculnya permukiman Panikel, Ujungalang, dan Ujung Gagak (Sanjatmiko, 2016). Dengan demikian, *forest enclosure* tidak hanya membentuk ulang lanskap lingkungan, tetapi juga mendistribusikan ulang manusia di sepanjang relasi hulu-hilir.

ENCLAVE NUSAKAMBANGAN DAN MUNCULNYA KAMPUNG LAUT (1880-1950)

Transformasi Nusakambangan menjadi koloni hukuman sejak akhir abad ke-19 menandai babak baru dalam sejarah Segara Anakan: pergeseran dari eksploitasi ekonomi menuju rezim pengawasan ekologis. Jika di Priangan *forest enclosure* bekerja melalui konservasi hutan, maka di pesisir selatan ia beroperasi melalui penutupan pulau dan perairan. Sejak 1880-an, Nusakambangan tidak lagi sekadar benteng pertahanan, tetapi menjadi kekuasaan yang mengintegrasikan disiplin atas manusia dan pengendalian atas alam.

Penetapan Nusakambangan sebagai koloni hukuman mencapai bentuk institusionalnya melalui

pendirian *Kolonie van Strafen* tahun 1905. Seperti ditunjukkan Stutje dkk. (2019), pulau ini menjadi laboratorium kolonial untuk menggabungkan hukuman, produksi agraris, dan konservasi.

Logika ini diperkuat melalui *Besluit Gouverneur-Generaal* 4 Juni 1937 yang dimuat dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* No. 369, yang menetapkan sebagian besar Nusakambangan sebagai *natuurmonument* (*Natuurmonumenten op het eiland Noesa Kambangan, 1937*). Secara de facto, pulau ini menjadi *verboden gebied*: aktivitas sipil dan perdagangan bebas dilarang. Hutan, rawa, dan pantai beralih fungsi menjadi konservasi pengawasan ekologis. Penjagaan lingkungan dipadukan dengan “menjaga ketertiban,” menjadikan Nusakambangan sebagai bentuk *enclosure* baru yang menutup ruang hidup demi keamanan dan moralitas kolonial

Kebijakan ini menggusur masyarakat yang sebelumnya tinggal di pesisir pulau. Tradisi lisan Kampung Laut mencatat figur-figur awal seperti Ki Jaga Playa, Ki Jaga Rasmi, dan Ki Jaga Laut sebagai penjaga pantai dan petani kelapa Nusakambangan. Ketika akses sipil ditutup, keturunan mereka menyingkir ke rawa-rawa muara Kalimalang dan Cimeneng, lalu berpindah lagi akibat banjir, malaria, dan tanah yang tidak stabil. Dari perpindahan inilah muncul kampung-kampung baru seperti Ujungalang, Panikel, dan Ujung Gagak (Sanjatmiko, 2016, 2018).

Migrasi ini merupakan ekspresi material dari *enclosure politic*: penyingkiran penduduk dari ruang produktif demi membentuk ruang pengawasan. Kampung Laut lahir di wilayah ambang—antara darat dan air, antara legalitas dan pelanggaran—sebagai ruang hidup bagi mereka yang terusir dari daratan negara. Ia bukan

desa pesisir “alami,” melainkan hasil sosial dari kolonialisasi ruang.

Penggunaan tenaga tahanan untuk menebang mangrove dan menggali kanal justru memperparah sedimentasi dan kerusakan ekosistem pesisir (Stutje, 2022). Namun kolonial menafsirkan degradasi ini sebagai “kegagalan moral” penduduk pribumi, bukan sebagai akibat kebijakan pengelolaan yang eksploitatif. Narasi ini memperluas legitimasi pengawasan: setiap kerusakan ekologis dibaca sebagai pembenaran bagi perluasan kontrol negara.

Media kolonial bahkan membingkai Nusakambangan sebagai “*tropical Siberia*,” ruang pembuangan bagi tubuh-tubuh yang dianggap liar (Stutje dkk., 2019). Stigma ini meluber ke Segara Anakan, yang dicitrakan sebagai perairan berbahaya—ruang para pelarian dan kriminal. Dengan demikian, pemisahan fisik pulau memproduksi pemisahan simbolik atas laguna dan masyarakat pesisirnya.

Pendudukan Jepang (1942) menghancurkan sebagian infrastruktur penjara, tetapi rezim pengawasan ekologis tetap bertahan (Zuhdi, 2002). Setelah kemerdekaan, kampung Ujungalang, Panikel, dan Ujung Gagak disatukan dalam wilayah administratif Kecamatan Kawunganten dan dikenal sebagai Kampung Laut. Dengan demikian, militerisasi Nusakambangan dan munculnya Kampung Laut merupakan satu rangkaian politik *enclosure* kolonial: dari eksploitasi ekonomi menuju pengawasan ekologis, dari hutan dan pulau menuju perairan dan kehidupan pesisir.

DISKUSI: PRODUKSI KOLONIAL ATAS LAGUNA

Sejarah Segara Anakan memperlihatkan bahwa kekuasaan kolonial bekerja tidak hanya melalui kekerasan, tetapi juga melalui

pengetahuan yang mengatur cara ruang dilihat dan dikelola. Sejak peta Pieter de Gilde (1692) dan survei hidrografi Paulusz (1739), Segara Anakan dimasukkan ke dalam *regime of visibility* kolonial: dunia air yang cair diterjemahkan ke dalam bahasa koordinat dan batas administratif. Dalam kerangka *critical cartography* (Craib, 2009; Crampton & Krygier, 2005; Harley, 1989), peta bukan sekadar representasi, melainkan teknologi kekuasaan yang memproduksi realitas geografis sesuai dengan logika kolonial. Laguna pun direduksi menjadi objek teknis yang dapat diukur, diawasi, dan diintervensi.

Kartografi kolonial ini berjalan seiring dengan perluasan *enclosure* di hulu dan hilir. Melalui Boschwezen, kolonial membentuk apa yang oleh Peluso (1992) disebut sebagai *political forest*—hutan yang dipetakan dan diatur demi fungsi politik dan ekonomi. Di hilir, prinsip serupa diterapkan melalui *political seascape*: Nusakambangan dijadikan penjara ekologis yang diklaim atas nama keamanan dan konservasi. Peta, laporan hidrologi, dan peraturan kehutanan kemudian membentuk satu rasionalitas baru tentang keteraturan alam, di mana pendangkalan laguna dibaca sebagai akibat kelalaian masyarakat, sementara negara tampil sebagai pelindung. Disinilah penjelasan Lefebvre (1991) ruang selalu merupakan hasil produksi sosial dan politik yang mencerminkan relasi kuasa tertentu.

Pada awal abad ke-20, transformasi Nusakambangan memperlihatkan pergeseran dari eksploitasi menuju pengawasan ekologis. Dalam sistem *Kolonie van Strafen*, kerja paksa digunakan untuk menebang hutan, menanam karet, dan menggali kanal sebagai proyek disiplin moral sekaligus konservasi (Stutje, 2022). Tubuh manusia dijadikan instrumen penataan lingkungan—sebuah praktik *disciplinary power*

sebagaimana dikemukakan Foucault (1979). Di sisi lain, masyarakat yang terusir dari pulau membangun ruang tandingan di seberang laguna. Kampung Laut lahir sebagai hasil sosial dari *enclosure politic*: ruang hidup bagi mereka yang dikeluarkan dari daratan negara, namun belum sepenuhnya milik laut.

Warisan epistemik kolonial itu tidak berhenti pada masa penjajahan. Negara pascakolonial mewarisi cara pandang yang sama dengan laguna diperlakukan sebagai masalah teknis, bukan sebagai lanskap historis. Meski demikian, praktik hidup masyarakat Kampung Laut menunjukkan bahwa ruang tidak pernah sepenuhnya tunduk pada peta dan proyek; ia tetap hidup, bergerak, dan selalu membuka kemungkinan untuk dibaca ulang dari sudut pandang selain kekuasaan.

SIMPULAN

Sejarah Segara Anakan menunjukkan bahwa kekuasaan kolonial membentuk ruang tidak hanya melalui tenaga dan modal, tetapi melalui produksi pengetahuan tentang alam. Pemetaan, klasifikasi, dan pengawasan ekologis—melalui peta VOC, *forest enclosure* di Priangan, dan konservasi Nusakambangan—membangun satu lanskap pengawasan yang menata sekaligus alam dan manusia. Segara Anakan, dengan demikian, menjadi contoh konkret bagaimana pengetahuan dan kekuasaan berkelindan dalam produksi ruang kolonial.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa Kampung Laut merupakan konsekuensi sosial dari kolonialisasi ruang tersebut. Komunitas ini lahir dari pengusiran dan adaptasi, dari peminggiran akibat *enclosure* hingga penutupan akses pesisir. Di ruang ambang antara darat dan air, masyarakat Kampung Laut membangun kehidupan amfibi yang merekam daya tahan terhadap kekuasaan dan perubahan

ekologis. Segara Anakan karenanya bukan sekadar bentang alam, tetapi arsip sosial-ekologis dari pertemuan antara kekuasaan kolonial dan kehidupan lokal.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian sejarah lingkungan kolonial dengan menunjukkan bahwa produksi ruang di Jawa berlangsung melalui integrasi eksploitasi ekonomi dan pengawasan ekologis. Penelitian lanjutan dapat menelusuri bagaimana warisan epistemik kolonial ini terus memengaruhi cara negara modern memahami relasi antara manusia, air, dan ruang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bird, E. C. F. (1982). Management problems in tropical estuaries. *Management Problem in Tropical Estuaries*. Proceeding of the workshop on coastal resources management on the Cilacap region, Jakarta. <https://agris.fao.org/search/en/providers/122456/records/6477539ff2e6fe92b364f3e1>
- Boomgaard, P. (1999). Oriental Nature, its Friends and its Enemies: Conservation of Nature in Late-Colonial Indonesia, 1889-1949. *Environment and History*, 5(3), 257-292.
- Breman, J. (2015). *Mobilizing Labour for the Global Coffee Market: Profits from an Unfree Work Regime in Colonial Java*. Amsterdam University Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt197055k>
- Coster, C. (1938). Bovengrondsche afstrooming en erosie op Java. *Tectona*, 31, 613-728.
- Craib, R. B. (2009). Relocating cartography. *Postcolonial Studies*, 12(4), 481-490. <https://doi.org/10.1080/13688790903350690>
- Crampton, J. W. (2011). Cartographic calculations of territory. *Progress in Human Geography*, 35(1), 92-103. <https://doi.org/10.1177/0309132509358474>
- Crampton, J. W., & Krygier, J. (2005). An Introduction to Critical Cartography. *ACME: An International Journal for Critical Geographies*, 4(1), 11-33. <https://doi.org/10.14288/acme.v4i1.723>

De Haan., J. H. (1931). Het een en ander over de Tjilat japsche Vloedbosschen. *Tectona*, 39-76.

De Jonge, G. W. K. (1911). *Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië*. Javasche Boekhandel & Drukkerij. <http://archive.org/details/geneeskundigtij21unkngoog>

Foucault, M. (1979). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Vintage Books.

Galudra, G., & Sirait, M. (2009). A Discourse on Dutch Colonial Forest Policy and Science in Indonesia at the Beginning of the 20th Century. *The International Forestry Review*, 11(4), 524-533.

Hardoyo, S. R. F. G. (1982). *The Kampung Laut of the Segara Anakan a study of socio-economic problems*. <https://agris.fao.org/search/en/providers/122456/records/647753b3f2e6fe92b364fb51>

HARLEY, J. B. (1989). Deconstructing the map. *Cartographica*, 26(2), 1-20. <https://doi.org/10.3138/E635-7827-1757-9T53>

Lefebvre, H. (1991). *The production of space*. Blackwell.

Lukas, M. C. (2014). Cartographic Reconstruction of Historical Environmental Change. *Cartographic Perspectives*, 78, 5-24. <https://doi.org/10.14714/CP78.1218>

Lukas, M. C. (2017a). Widening the scope: Linking coastal sedimentation with watershed dynamics in Java, Indonesia. *Regional Environmental Change*, 17(3), 901-914. <https://doi.org/10.1007/s10113-016-1058-4>

Lukas, M. C. (2017b). Widening the scope: Linking coastal sedimentation with watershed dynamics in Java, Indonesia. *Regional Environmental Change*, 17(3), 901-914. <https://doi.org/10.1007/s10113-016-1058-4>

McNeill, J. R. (2003). Observations on the Nature and Culture of Environmental History. *History and Theory*, 42(4), 5-43. <https://doi.org/10.1046/j.1468-2303.2003.00255.x>

Meindersma, H. W. (1923). Eenige bijzonderheden over mangrove- bosschen. *Tropische Natuur*, 12, 25-31, 39-46, 70-77.

Natuurmonumenten op het eiland Noesa Kambangan, Pub. L. No. 369, Staatsblad van Nederlandsch-Indië (1937).

Oosterling, H. (1927). De hydrologische functie cler in stand te houden wildhoutbosschen en de waarborgen voor een goede vervulling daarvan. *Tectona*, 20, 538-545.

Paulusz, C. P. N. P. (1739). *Nederlands: Kaart van de zuidkust van Java, deel A* [Nederlands: ingekleurde tekening op papier / linnen English: coloured drawing on paper / linen]. Nationaal Archief. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AMH-6081-NA_Map_of_Java%27s_southern_coast_part_A.jpg

Peluso, N. L. (1992). *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java* (1 ed.). University of California Press. <https://doi.org/10.2307/jj.5973058>

Sanjatmiko, P. (2016). *COMMOM PROPERTY DI TENGAH PERUBAHAN BENTANG ALAM KAWASAN SEGARA ANAKAN* (1 ed.). Departemen Antropologi FISIP Universitas Indonesia.

Sanjatmiko, P. (2018). *Orang Kampung Laut dan Alam Segara Anakan: Keunikan Budaya dan Keanekaragaman Jenis Mangrovenya* (T. H. Wahyono & A. J. Rianto, Ed.). Universitas Indonesia.

Schilder, G. (1981). *The Charting of the South Coast of Java*. <https://doi.org/10.3406/arch.1981.1672>

Schwerdtner Máñez, K. (2010). Java's forgotten pearls: The history and disappearance of pearl fishing in the Segara Anakan lagoon, South Java, Indonesia. *Journal of Historical Geography*, 36(4), 367-376. <https://doi.org/10.1016/j.jhg.2010.03.004>

Setyawan, W. B. (2002). DEVELOPMENT OF SEGARA ANAKAN: A Preliminary Study. *DEVELOPMENT OF SEGARA ANAKAN*, 31.

<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3594.2482>

Stutje, K. (2022). Nusakambangan in context: Life and labour conditions in a late colonial penal plantation in the Netherlands Indies, 1905–42. *Journal of Southeast Asian Studies*, 53(1–2), 57–79. <https://doi.org/10.1017/S0022463422000224>

Stutje, K., Plard, C., Henninger, M., & Rozalín, V. S. (2019). From Across the Water: Nusakambangan and the Making of a Notorious Prison Island. *International Review of Social History*, 64(3), 493–513.

Sujanto, F. X., & Sumantri, Y. R. (1977). Preliminary study on the Tertiary depositional pattern of Java. *Preliminary study on the Tertiary depositional pattern of Java.*, 6, 183–213.

Zahro, Q. (2013). *Human Migration In The Cathcman Area Of Segara Anakan Lagoon Since 1850-2010* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/64522>

Zuhdi, S. (2002). *Cilacap (1830-1942): Bangkit dan runtuhnya suatu pelabuhan di Jawa*. Kepustakaan Populer Gramedia.